

INTISARI

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan di berbagai daerah. Banyak PKL berjualan di bahu jalan yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro. Dalam hal mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun pada implementasinya, meskipun ada Perda yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL namun kebijakan yang ada saat ini tidak sesuai dengan Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di sepanjang Jln Diponegoro Kab. Sumenep. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada teori Samodra Wibawa ada empat fungsi evaluasi yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak organisasi pemerintahan daerah yang terlibat dalam mengatur pedagang kaki lima yang berada disepanjang Jalan Diponegoro. Diharapkan pemerintah harus segera menyediakan tempat khusus berjualan bagi PKL dan juga harus melakukan pemberdayaan lebih serius kepada para PKL seperti bantuan pemberian modal agar membantu meningkatkan kesejahteraan PKL, menciptakan lingkungan yang lebih tertata rapi dan nyaman bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

MADURA

ABSTRAC

The existence of street vendors creates problems in various regions. Many street vendors sell on the side of the road along Jalan Diponegoro. In an effort to overcome the PKL problem, the Sumenep Regency government has issued Regional Regulation of Sumenep Regency Number 11 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. However, in its implementation, although there is a Perda regulating the arrangement and empowerment of street vendors, the current policy does not comply with the applicable Perda. This study aims to determine the evaluation of policies for the arrangement and empowerment of street vendors along Jalan Diponegoro Kab. Sumenep. The methodology used in this research is a qualitative approach with a descriptive type and data collection through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation and verification/conclusion drawing. The focus of the research refers to Samodra Wibawa's theory, there are four evaluation functions, namely explanation, compliance, audit and accounting. The research results show that many local government organizations are involved in regulating street vendors along Jalan Diponegoro. It is hoped that the government should immediately provide a special place for street vendors to sell and also carry out more serious empowerment for street vendors such as providing capital assistance to help improve street vendors welfare, create a more orderly and comfortable environment for the community, and encourage local economic growth.

Keywords: Policy, Policy Evaluation, Arrangement and Empowerment of Street Vendors